

Sawit Pesisir Selatan Kurang Terserap

Tanggal : Selasa , 22 September 2020
Media : Bisnis Indonesia
Halaman : 20
Wartawan :
Muatan Berita : Netral
Narasumber : Suardi (*Sekretaris Dinas TPHP Kab. Wajo*), Zulfadli (*Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau*)
Rubrik : Investasi
Topik : Sawit

| KOMODITAS PERKEBUNAN |

Sawit Pesisir Selatan Kurang Terserap

Bisnis, PADANG — Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat membuka peluang investasi pabrik *crude palm oil* (CPO) untuk menampung kelapa sawit hasil kebun rakyat.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan Suardi mengatakan bahwa pada saat ini baru daerah Lunang yang memiliki pabrik CPO.

“Di Pesisir Selatan perkebunan kelapa sawit paling luas ada di daerah Lunang. Jadi pabrik CPO yang selama ini beroperasi di sana belum sepenuhnya bisa menampung hasil panen perkebunan rakyat,” kata Suardi ketika dihubungi *Bisnis* dari Padang, Minggu (20/9).

Dua perusahaan CPO yang beroperasi saat ini adalah PT Incasi Raya dan PT Muara

Sawit Lestari. Incasi Raya tidak membeli hasil panen perkebunan rakyat karena sudah memiliki lahan sendiri.

Sementara itu, Muara Sawit Lestari menampung hasil perkebunan rakyat tetapi kapasitasnya masih kecil. Perseoran kini sedang menambah kapasitas dengan investasi senilai Rp200 miliar.

“Sekarang pabrik kedua PT Muara Sawit Lestari tengah dibangun lagi,” jelasnya.

Pemkab Pesisir Selatan membuka peluang investasi untuk pabrik CPO agar dapat menyerap lebih banyak hasil sawit dari kebun rakyat.

Syahrill, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumbar, mengatakan pembangunan pabrik CPO adalah salah satu cara untuk mengangkat kesejahteraan petani.

“Saya malah menginginkan

agar masyarakat yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit membangun sebuah koperasi dan nantinya memiliki target membuat pabrik CPO mini,” katanya.

Sementara itu, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Riau hingga saat ini telah mencapai 6.100 hektare (ha) dari target 14.500 ha yang verifikasi dikelola oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Tahun ini, Riau juga mendapatkan dana PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS) untuk *replanting* seluas 24.000 ha lahan sawit.

Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulfadli mengatakan verifikasi terhadap 9.500 ha akan dilakukan oleh *supplier* secara langsung, sedangkan sisanya seluas 14.500 ha akan diverifikasi oleh dinas perkebunan. (k56/k42)